



Pengaruh Tingkat Pendidikan, Ketimpangan Pendapatan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2020–2024

Nugroho Adhi Puspito, Asih Murwiati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

adhinugrohopuspito@gmail.com, asih.murwiati@feb.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap kemiskinan di Provinsi Papua Barat periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif, data sekunder berupa data panel dari tujuh kabupaten selama lima tahun diolah menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM) berbasis Cluster-Robust Standard Error. Hasil analisis statistik deskriptif dan ekonometrika menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan memengaruhi angka kemiskinan dengan daya jelaskan sebesar 81,06% ($R^2 = 0,8106$). Secara parsial, RLS terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan yang mengindikasikan bahwa peningkatan akses serta durasi pendidikan merupakan faktor penentu utama dalam memangkas tingkat kemiskinan secara drastis. Sebaliknya, Rasio Gini tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik menandakan bahwa dinamika ketimpangan pendapatan bukanlah pemicu utama fluktuasi kemiskinan di kawasan ini. Temuan unik memperlihatkan bahwa TPT berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini terjadi karena masyarakat prasejahtera di Papua Barat tidak memiliki kemewahan untuk menganggur, melainkan terpaksa bekerja di sektor informal atau pertanian subsisten berupah rendah demi bertahan hidup, sehingga terdapat secara resmi sebagai pekerja meski tetap berada di bawah garis kemiskinan. Kesimpulannya, pengentasan kemiskinan di Papua Barat menuntut adanya pemerataan fasilitas pendidikan formal hingga wilayah terpencil, diimbangi dengan skema proteksi upah serta perbaikan kualitas lapangan kerja di sektor informal.

Kata kunci: Akses Pendidikan; Rasio Gini; Pengangguran Terbuka; Kemiskinan; Papua Barat

Abstrak

This study aims to analyze the effect of the average length of school (RLS), Gini ratio, and open unemployment rate (TPT) on poverty in West Papua province for the period 2020-2024. This study uses an explanatory quantitative approach, secondary data in the form of panel data from seven districts for five years processed using the method of fixed Effect Model (FEM) based on Cluster-Robust Standard Error. The results of descriptive statistical analysis and econometrics showed that the three independent variables simultaneously affect the poverty rate with explanatory power of 81.06% ($R^2=0.8106$). In part, RLS has been shown to have a negative and significant effect, indicating that increasing access to and duration of education is a major determining factor in drastically reducing poverty levels. In contrast, the Gini ratio does not exert a statistically significant influence indicating that the dynamics of income inequality is not the main trigger for fluctuations in poverty in the region. Unique findings show that TPT has a negative and significant effect. This is because the underprivileged people in West Papua do not have the luxury of being unemployed, but are forced to work in the informal sector or low-wage subsistence agriculture for the sake of survival, so they are officially registered as workers even though they remain below the poverty line. In conclusion, poverty alleviation in West Papua requires the equitable distribution of formal education facilities to remote areas, balanced with wage protection schemes and improving the quality of employment in the informal sector.

Keywords: Access to Education; Gini Ratio; Open Unemployment; Poverty; West Papua

1. Pendahuluan

Problematisasi kemiskinan pada dasarnya bukanlah isu tunggal yang semata-mata diukur dari minimnya pemasukan finansial, melainkan sebuah krisis sosial lintas sektoral. Mengacu pada kerangka *Multidimensional Poverty Index* (MPI), kondisi miskin dimaknai sebagai situasi ketidakberdayaan di berbagai bidang kehidupan yang merampas hak asasi seseorang untuk mencapai standar hidup yang pantas (Alkire & Foster, 2011). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terfasilitasi untuk memperoleh sumber daya, layanan kesehatan, hunian, pendidikan, serta peluang pembangunan yang layak.

Disparitas kesejahteraan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang masif, terutama di kawasan yang diwarnai ketimpangan spasial dan ekonomi layaknya Provinsi Papua Barat. Publikasi Badan Pusat Statistik pada Maret 2025 mengindikasikan bahwa rasio penduduk miskin di provinsi ini menyentuh angka 20,66%. Persentase ini melonjak sangat ekstrem jika disandingkan dengan rata-rata kemiskinan secara nasional yang hanya berada di level 8,47% pada periode yang sama (BPS Provinsi Papua Barat, 2025b). Fakta ini mengonfirmasi bahwa persoalan kemelaratan di Papua Barat berakar pada karakteristik struktural yang teramat kompleks, yang mustahil diselesaikan hanya melalui kacamata pendapatan. Tingkat kompleksitas tersebut sangat dipengaruhi oleh topografi Papua Barat yang sarat dengan pegunungan, lembah terjal, kawasan hutan, dan distrik-distrik yang terisolasi. Hambatan geografis ini menyumbat urat nadi pemerataan layanan esensial dan roda ekonomi, memicu lonjakan ongkos logistik untuk kebutuhan pokok, serta semakin melebarkan jurang pemisah kesejahteraan antara warga perkotaan dan pedalaman (Suryadarma et al., 2021).

Meskipun Provinsi Papua Barat dihadapkan pada tingginya angka kemiskinan dan berbagai tantangan pembangunan yang kompleks, indikator makroekonomi wilayah ini justru memperlihatkan tren yang sangat positif. Berdasarkan rekam jejak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, perekonomian Papua Barat terus mengalami eskalasi tajam dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan nilai PDRB per kapita ini mencerminkan adanya pertumbuhan nilai tambah produksi barang dan jasa yang pesat di tingkat regional, sekaligus menjadi gambaran ekspansi roda perekonomian daerah yang terakselerasi secara berkelanjutan selama lima tahun terakhir. Rincian perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut disajikan secara eksplisit pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat tahun 2020-2024

No	Tahun	Data Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB perkapita
1	2020	73.933
2	2021	74.022
3	2022	78.141
4	2023	108.110
5	2024	131.636

Sumber: BPS (2025)

Berdasarkan Tabel 1, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat selama periode 2020 hingga 2024 yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan secara bertahap. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp73.933 ribu, kemudian mengalami kenaikan perlahan pada tahun 2021 menjadi Rp74.022 ribu dan terus merangkak naik ke angka Rp78.141 ribu pada tahun 2022. Lonjakan ekonomi yang sangat tajam mulai terjadi pada tahun 2023 ketika PDRB per kapita menembus angka Rp108.110 ribu, hingga akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar Rp131.636 ribu. Melesatnya nilai PDRB per kapita ini mengindikasikan ekspansi kinerja perekonomian makro daerah yang pesat, meskipun tingginya angka rata-rata agregat tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan sejauh mana dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Namun, karena PDRB pada hakikatnya merupakan nilai rata-rata agregat, lonjakan angka ini rupanya gagal bertranslasi menjadi pemerataan kesejahteraan yang riil di akar rumput, melainkan berpotensi menutupi adanya ketimpangan distribusi kekayaan.



Gambar 1. Grafik Jumlah Penduduk miskin di Papua Barat tahun 2024
 Sumber: (BPS Provinsi Papua Barat, 2025b)

Kemiskinan lazimnya diukur oleh BPS berdasarkan batas garis ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan subsisten. Namun, kemiskinan di Papua Barat bercorak struktural, di mana jebakan kemiskinan berjangka panjang diwariskan oleh buruknya ketersediaan infrastruktur dan kesempatan kerja yang layak (Widiastuti, 2010). Keteringgalan fasilitas publik ini membuat sebagian masyarakat kehilangan momentum untuk menikmati kue pembangunan, yang pada gilirannya terus mengawetkan gap sosial-ekonomi antardaerah. Hal ini dibuktikan melalui data penurunan agregat kemiskinan pada September 2024 turun menjadi 108,28 ribu jiwa atau 21,09%. Meskipun angka agregat turun, kemiskinan di kawasan perkotaan justru merangkak naik dari 8,17% menjadi 9,50%. Pergeseran ini mempertegas bahwa kemiskinan senantiasa bermutasi menjadi persoalan lintas wilayah yang membutuhkan diagnosis presisi.

Dinamika ini menuntut evaluasi mendalam pada tiga pilar utama: pendidikan, ketimpangan, dan serapan tenaga kerja. Pendidikan bertindak sebagai instrumen vital dalam mendongkrak keahlian guna menembus pasar kerja produktif. Penelitian yang dilakukan Fattah dan Rahman (2023) serta Afrianto (2025) sepakat mengatakan bahwa semakin tinggi kualitas pendidikan, semakin kuat resistensi masyarakat terhadap kemiskinan.

Tabel 2. Partisipasi Murni Papua Barat tahun 2020-2024

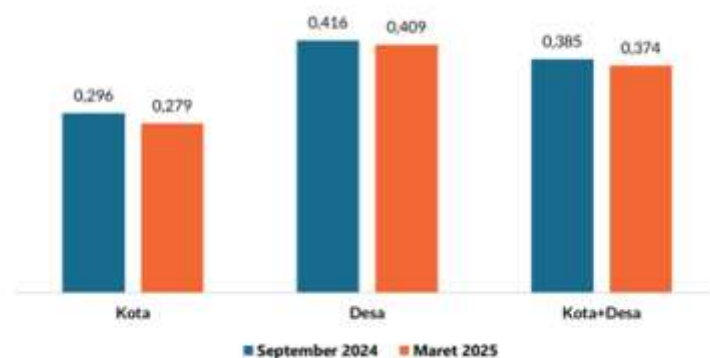
Tahun	Angka Partisipasi Murni berdasarkan tingkat Pendidikan (%)			
	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
2020	93.88	70.51	63.62	22.13
2021	94.19	70.52	63.51	22.22
2022	94.31	71.38	63.66	20.67
2023	94.52	74.70	65.92	20.25
2024	94.65	74.81	66.01	20.19

Sumber: Data diolah Penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 2, Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Papua Barat selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang berlawanan antara jenjang pendidikan dasar-menengah dengan jenjang perguruan tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, partisipasi masyarakat memperlihatkan ekspansi

yang persisten dan positif; APM SD meningkat secara konsisten dari 93,88% pada tahun 2020 menjadi 94,65% pada tahun 2024, APM SMP merangkak naik dari 70,51% menjadi 74,81%, dan APM SMA turut menguat dari 63,62% ke level 66,01%. Namun, kondisi sebaliknya justru terjadi pada tingkat Perguruan Tinggi, di mana tingkat partisipasi murni mengalami peluruhan gradual dari 22,13% pada tahun 2020 menjadi 20,19% pada tahun 2024. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun akses terhadap pendidikan dasar hingga menengah semakin meluas di Papua Barat, terdapat kendala struktural krusial di pucuk piramida pendidikan formal yang menyulitkan lulusan menengah untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Situasi ini melegitimasi penggunaan variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dalam penelitian ini, karena rasio tersebut merupakan proksi paling akurat untuk mengukur akumulasi modal manusia usia produktif di lapangan.

Selain pendidikan, Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat. Nilai mendekati satu menunjukkan ketimpangan lebih tinggi, sedangkan mendekati nol menunjukkan distribusi lebih merata. Di Papua Barat, Gini Ratio Maret 2025 sebesar 0,374. Ketimpangan dapat memperbesar risiko kemiskinan apabila masyarakat berpendapatan rendah tidak memperoleh manfaat pembangunan secara merata (BPS Provinsi Papua Barat, 2025b).



Gambar 2. Gini Rasio Provinsi Papua Barat September 2024 - Maret 2025
Sumber: (BPS Provinsi Papua Barat, 2025b)

Pilar kedua adalah ketimpangan pengeluaran yang diestimasi melalui Rasio Gini. Berdasarkan rilis BPS Provinsi Papua Barat (2025b), Gini Ratio tercatat menyempit secara agregat dari 0,385 (September 2024) ke 0,374 (Maret 2025), diikuti dengan penyusutan disparitas di tingkat desa maupun kota. Namun, sesuai temuan Putra et al. (2021), ketidakmerataan yang tak tertangani tuntas dapat menjadi pemicu kronis yang mengkristalkan garis kemiskinan akibat terpinggirkannya kaum ekonomi lemah dari perputaran modal daerah.



Gambar 3. Infografis Ketenagakerjaan Papua Barat
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2025

Pilar ketiga adalah ketersediaan lapangan kerja yang direfleksikan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Menyempitnya ceruk pekerjaan berkorelasi langsung terhadap kemerosotan stabilitas finansial keluarga, sebuah premis yang ditekan oleh Gozali & Nurikmah (2025) serta Hutabarat et al. (2025). Hingga Februari 2025, TPT Papua Barat bergeser tipis ke angka 4,21%. Fakta menariknya, tekanan pengangguran mulai menyebar; saat pengangguran kota menurun ke 4,32%, pengangguran di perdesaan justru menanjak menjadi 4,16%.

Meskipun studi mengenai keterkaitan antara pendidikan, ketimpangan, dan ketenagakerjaan terhadap kemiskinan telah banyak dilakukan, mayoritas literatur terdahulu masih berfokus pada wilayah berbasis perindustrian atau kawasan perkotaan dengan pasar kerja formal yang terstruktur, sehingga menghasilkan *research gap* berupa minimnya analisis empiris ekonometrika data panel yang membedah anomali struktural di kawasan timur Indonesia yang diwarnai isolasi geografis ekstrem dan dominasi industri ekstraktif *enclave*. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengungkapan anomali hubungan negatif antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan di Papua Barat sebuah temuan yang mendobrak postulat teori ekonomi makro klasik akibat fenomena jebakan sektor informal di mana masyarakat prasejahtera terpaksa bekerja serabutan berupa minim demi bertahan hidup sehingga terdata bekerja secara statistik meski tetap terjerat kemiskinan. Selain itu, kebaruan studi ini juga ditunjukkan melalui pembuktian empiris berbasis *Fixed Effect Model* dengan *Cluster-Robust Standard Error* bahwa penurunan ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) tidak serta-merta mampu memangkas angka kemiskinan selama hambatan fisik dan isolasi infrastruktur dasar belum dibongkar secara menyeluruh.

Bertitik tolak dari tingginya rasio kemiskinan di tengah melesatnya angka PDRB, serta minimnya publikasi komprehensif yang mengupas wilayah timur Indonesia, studi ini menjadi urgen untuk dilaksanakan. Riset ini didedikasikan untuk menginvestigasi pengaruh spesifik dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap dinamika kemiskinan di Provinsi Papua Barat selama periode 2020-2024 dengan memanfaatkan ekonometrika data panel. Hasil analisis ini diproyeksikan mampu menyuplai landasan empiris yang tajam guna memformulasikan cetak biru kebijakan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan fisik maupun intelektual.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-eksplanatif guna mengurai keterkaitan antara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang merepresentasikan kualitas pendidikan, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selaku variabel independen terhadap persentase kemiskinan di Papua Barat sebagai variabel dependen. Penarikan sampel dalam riset ini menggunakan metode sensus atau sampel jenuh, yang mencakup seluruh populasi wilayah tingkat II di provinsi tersebut, yakni tujuh kabupaten yaitu Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. Mengingat rentang waktu pengamatan berlangsung selama lima tahun yaitu tahun 2020-2024, penelitian ini secara keseluruhan menganalisis 35 titik observasi data.

Guna memastikan akurasi pengukuran, setiap instrumen penelitian didefinisikan secara operasional: RLS dikalkulasi berdasarkan akumulasi tahun pendidikan formal, Rasio Gini direpresentasikan melalui indeks disparitas pendapatan, TPT dihitung dari persentase angkatan kerja yang tidak terserap pasar, dan tingkat kemiskinan merujuk pada persentase penduduk prasejahtera. Seluruh indikator tersebut merupakan data sekunder berstruktur panel yang dihimpun menggunakan teknik rekam jejak dokumentasi. Sumber utama dari himpunan informasi kuantitatif ini bersumber dari berbagai laporan dan publikasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat pada periode yang diteliti.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini bertumpu pada pendekatan ekonometrika regresi data panel yang diawali dengan penjabaran statistik deskriptif guna memberikan gambaran awal mengenai karakteristik, tendensi sentral, serta dispersi dari masing-masing variabel pengamatan. Selanjutnya, penentuan spesifikasi model ekonometrika paling ideal antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM) diseleksi secara akurat melalui pengujian spesifikasi beruntun yang mencakup Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Berdasarkan hasil serangkaian pengujian spesifikasi tersebut, pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) terbukti menjadi model dasar yang paling tepat untuk mengestimasi parameter regresi penelitian.

Guna menjamin keabsahan dan konsistensi estimator, evaluasi dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang mendeteksi adanya gangguan autokorelasi orde pertama menggunakan metode *Wooldridge test*. Karena

teridentifikasi adanya gejala autokorelasi dan heteroskedastisitas, estimasi model akhir dioptimalkan dengan mengadopsi struktur *Fixed Effect Model* (FEM) yang dimodifikasi menggunakan *Cluster-Robust Standard Error* agar *standard error* yang dihasilkan tetap valid dan bebas bias. Pada tahap akhir, pembuktian hipotesis dieksekusi secara komprehensif melalui evaluasi koefisien determinasi untuk mengukur daya jelaskan model, Uji F untuk menguji pengaruh variabel prediktor secara simultan, serta Uji t untuk menilai signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial dengan menetapkan batas signifikansi sebesar 5%.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisa Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil analisa statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Dev	Min	Maks
TK	35	25,27829	6.182961	14.41	34.7
RLS	35	7,738	1.249783	5.12	9.35
GINI	35	.3749143	.0332259	.268	.425
TPT	35	4,117714	2.651917	.12	11.45

Sumber : Stata MP 14.2 Data diolah (2026)

Berdasarkan pengolahan data, tinjauan statistik deskriptif memberikan rincian profil data melalui indikator rentang ekstrem (nilai minimum dan maksimum), tendensi sentral (rata-rata/mean), serta tingkat dispersi (standar deviasi) dari setiap variabel pengamatan. Secara rinci, tingkat kemiskinan (variabel dependen) di Papua Barat rata-rata berada pada angka 25,28%, dengan rentang fluktuasi antara 14,41% hingga 34,70%. Tingginya standar deviasi sebesar 6,18 poin merefleksikan disparitas kemiskinan yang cukup lebar antarkabupaten. Pada variabel akses pendidikan, durasi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 7,74 tahun (berkisar antara 5,12 hingga 9,35 tahun). Standar deviasi 1,25 mengindikasikan pemerataan pendidikan antarwilayah berada di level moderat. Selanjutnya, indeks ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) mencatatkan rata-rata 0,375 dengan standar deviasi yang sangat minim (0,033), menandakan bahwa struktur kesenjangan relatif seragam di seluruh area observasi. Di sisi lain, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki rerata 4,12% dengan simpangan baku 2,65, yang menyoroti adanya gap daya serap tenaga kerja yang cukup asimetris antardaerah.

Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi merupakan tahapan krusial dalam analisis ekonometrika data panel yang bertujuan untuk menentukan pendekatan estimasi paling tepat dan efisien antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM) guna menggambarkan hubungan antarvariabel secara akurat. Proses penyeleksian ini dilakukan melalui serangkaian pengujian formal beruntun, seperti Uji Chow untuk memilih antara CEM dan FEM, Uji Hausman untuk menentukan pilihan terbaik antara FEM dan REM, serta Uji *Lagrange Multiplier* (LM) jika diperlukan. Penetapan model regresi yang presisi sangat penting agar parameter estimasi yang dihasilkan tidak bias, memenuhi kriteria keabsahan statistik, dan mampu mengakomodasi karakteristik individual antarwilayah maupun dinamika perbedaan waktu dalam data yang diteliti.

Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Hasil dari uji chow adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistik	d.f.	Prob.	Kesimpulan
F test that all u _i =0	346,00	(6, 25)	0,0000	<i>Fixed effect</i>

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Merujuk pada Tabel 5, hasil pengujian Uji Chow memunculkan nilai probabilitas mutlak sebesar 0,0000. Mengingat angka tersebut jauh berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05, maka hipotesis nol (H_0) secara otomatis ditolak. Konsekuensinya, *Fixed Effect Model* ditetapkan sebagai pendekatan estimasi yang lebih presisi untuk penelitian ini dibandingkan spesifikasi *common effect*, yang selanjutnya mewajibkan proses evaluasi berlanjut ke tahap Uji Hausman.

Uji Hausman

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Hausman

Effects Test	Chi-Sq. Statistic	d.f.	Prob.	Kesimpulan
Cross-section random	25,37	2	0,0000	<i>Fixed effect</i>

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Tabel 6 menunjukkan nilai Nilai Prob sebesar $0,0000 < 0,05$ menyebabkan H_0 ditolak, sehingga model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Pengujian Chow menghasilkan nilai probabilitas mutlak 0,0000, yang menggugurkan model CEM dan merekomendasikan FEM. Konfirmasi ini diperkuat oleh Uji Hausman yang turut mencetak nilai probabilitas 0,0000, sehingga FEM kembali unggul dibandingkan REM. Konsensus dari kedua uji tersebut membuat Uji *Lagrange Multiplier* tidak lagi relevan untuk dilakukan, menetapkan *Fixed Effect Model* sebagai instrumen estimasi utama.

Uji Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan *Wooldridge test for autocorrelation in panel data*, dengan hipotesis H_0 : tidak ada autokorelasi orde pertama.

Tabel 7 Uji Autokorelasi

F-statistic	df	Prob > F
8,840	(1, 6)	0,0249

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Nilai *Prob > F* sebesar $0,0249 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Artinya, terdapat autokorelasi orde pertama pada model. Menurut Gujarati (2010), autokorelasi menyebabkan estimator OLS tetap tidak bias namun tidak lagi efisien, sehingga standard error yang dihasilkan menjadi tidak valid untuk pengujian hipotesis. Masalah ini telah diantisipasi dengan menggunakan estimasi *Fixed Effect Model* dengan *cluster robust standard error* pada model regresi final, sehingga standard error tetap valid meskipun terdapat autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas

	RLS	GINI	TPT
RLS	1,0000		
GINI	0,4403	1,0000	
TPT	0,7344	0,2618	1,0000

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Variabel	VIF	1/VIF
RLS	2,53	0,394580
GINI	2,19	0,455917
TPT	1,25	0,797923
Mean VIF	1,99	-

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Evaluasi terhadap matriks korelasi memperlihatkan bahwa tidak satupun hubungan antarvariabel independen melampaui ambang batas kritis 0,85, di mana korelasi puncak hanya tercatat pada angka 0,7344 untuk interaksi antara variabel X1 dan X3. Temuan ini turut diperkuat secara solid oleh hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) yang secara keseluruhan berada di bawah nilai toleransi maksimal 10, dengan rata-rata (Mean VIF) sebesar 1,99. Merujuk pada pemenuhan indikator-indikator tersebut, dapat dipastikan secara meyakinkan bahwa kerangka data dalam penelitian ini sepenuhnya terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Effects Test	Chi-Sq. Statistic	d.f.	Prob. > chi2
Breusch-Pagan/Cook-Weisberg	4,04	1	0,0444

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Hasil pengujian statistik memperlihatkan nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,0444. Karena angka tersebut lebih rendah dari batas toleransi kesalahan 5% (0,05), maka hipotesis nol (H_0) otomatis tergugurkan, yang secara langsung mengonfirmasi adanya gejala heteroskedastisitas pada kerangka pengujian. Sebagai bentuk mitigasi atas masalah tersebut, perumusan final *Fixed Effect Model* dalam studi ini dimodifikasi dengan mengadopsi pendekatan *Cluster-Robust Standard Error* yang dikelompokkan berdasarkan unit kabupaten/kota. Prosedur korektif ini wajib diaplikasikan demi mempertahankan konsistensi parameter estimasi sekaligus menggaransi keabsahan serta validitas kesimpulan uji statistic (Gujarati, 2010).

Analisa Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman (Bagian 4.3), model yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

Tabel 10 Hasil Regresi Fixed Effect - Cluster Robust (Model Final)

Variabel	Koefesien	Std. Error	T statistik	Prob
C	59,07203	4,275035	13,82	0,000
<i>RLS</i>	-4,029706	0,446334	-9,03	0,000
<i>GINI</i>	-5,587603	2,667739	-2,09	0,081
<i>TPT</i>	-0,125557	0,047400	-2,65	0,038
R-squared (within)	: 0,8106			
F(3,25) = 35,67	Prob > F = 0,0000			
sigma_u	: 4,0561659			
sigma_e	: 0,4763356			
rho	: 0,9864 (98,64% variasi dijelaskan oleh perbedaan antar kabupaten/kota)			

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Berdasarkan tabel 10 di atas, dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = C(1) + C(2)*RLS + C(3)*GINI + C(4)*TPT$$

$$TK = 59,07203 - 4,029706*RLS - 5,587603*GINI - 0,125557*TPT$$

Nilai konstanta (C) dari persamaan regresi tersebut tercatat sebesar 59,07203. Angka ini merepresentasikan titik dasar atau *baseline* model ekonometrika yang bermakna bahwa apabila seluruh variabel prediktor—yakni Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)—diasumsikan berada pada titik nol absolut, maka estimasi tingkat kemiskinan di wilayah pengamatan akan secara statis menetap pada level 59,07203%.

Dari sisi instrumen independen, indikator pendidikan (RLS) memunculkan koefisien sebesar -4,029706 dengan tingkat signifikansi yang sangat meyakinkan ($p\text{-value } 0,000 < 0,05$). Fakta ini menegaskan bahwa setiap penambahan durasi edukasi selama satu tahun penuh akan memangkas angka kemiskinan secara riil sebesar 4,03 satuan, dengan syarat faktor makro lainnya tidak berubah (*ceteris paribus*). Sebaliknya, indikator ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) mencatatkan koefisien -5,587603. Meskipun secara matematis eskalasi satu satuan indeks ini mengindikasikan penurunan kemiskinan hingga 5,59 satuan, dampaknya tidak bisa dianggap valid atau tidak bermakna secara statistik karena nilai probabilitasnya (0,081) melampaui batas toleransi kesalahan 5%.

Pada variabel penyerapan tenaga kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menghasilkan koefisien sebesar -0,125557 yang terbukti dampaknya signifikan ($p\text{-value } 0,038 < 0,05$). Berdasarkan nilai tersebut, setiap lonjakan satu satuan persentase pengangguran justru akan mereduksi angka kemiskinan sebesar 0,13 satuan (*ceteris paribus*). Arah korelasi negatif ini menghadirkan sebuah anomali empiris, mengingat hasil tersebut mendobrak dan bertolak belakang dengan postulat ekonomi konvensional yang selalu meyakini bahwa lonjakan pengangguran berbanding lurus dengan tingginya kemelaratan masyarakat.

Interpretasi Fixed Effect

Tabel 11 Nilai Intersep Individual (α_i) Kabupaten/Kota di Papua Barat

No.	Kabupaten/Kota	α_i
1	Kaimana	53,10029
2	Manokwari	56,70637
3	Pegunungan Arfak	56,85126
4	Manokwari Selatan	58,34962
5	Fakfak	61,43752
6	Teluk Wondama	61,70362
7	Teluk Bintuni	65,35553

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Merujuk pada hasil pengujian efek individu yang terlampir pada Tabel 11, Kabupaten Teluk Bintuni tercatat membukukan nilai intersep tertinggi yang menyentuh angka 65,36. Secara ekonometrika, besaran nilai dasar (*baseline*) ini merepresentasikan fakta bahwa jika diasumsikan pengaruh seluruh variabel prediktor yakni Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dikendalikan atau dianggap konstan, wilayah ini secara inheren menanggung beban kemiskinan dasar yang paling parah dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya di area pengamatan. Tingginya titik tolak kemiskinan di kawasan ini disinyalir berakar kuat pada konstelasi dan karakteristik struktural perekonomian daerah yang cenderung kaku dan menetap. Secara spesifik, fondasi ekonomi Teluk Bintuni memiliki tingkat ketergantungan yang sangat masif terhadap eksploitasi

sumber daya alam, khususnya pada penguasaan sektor ekstraktif berskala besar seperti industri minyak dan gas bumi (migas).

Dominasi industri ekstraktif tersebut sayangnya memunculkan fenomena perekonomian yang bersifat *enclave* atau terisolasi dari sektor ekonomi riil di sekitarnya. Akibatnya, perputaran modal dan keuntungan masif dari industri migas tersebut gagal menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang inklusif bagi denyut nadi perekonomian masyarakat lokal, sehingga aliran kesejahteraan cenderung eksklusif dan tidak menetes ke lapisan bawah. Problematika struktural perekonomian ini semakin diperparah oleh tantangan topografi dan isolasi geografis wilayah yang sangat membatasi mobilitas maupun aksesibilitas warga. Situasi spasial yang sulit tersebut mengakibatkan penetrasi program pemerataan kesejahteraan antarkecamatan menjadi sangat timpang. Alhasil, meskipun secara kasat mata beberapa indikator makro layaknya angka pengangguran (TPT) terlihat cukup terkendali, realitas kemiskinan struktural tetap mengakar kuat akibat ketidakmerataan akses ekonomi.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam ekonometrika data panel merupakan prosedur inferensi statistik yang bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah variabel-variabel independen baik secara parsial maupun bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi yang ditentukan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Evaluasi terhadap koefisien determinasi (yang bertujuan untuk mengukur ketepatan daya jelaskan model ekonometrika menunjukkan hasil yang sangat kuat pada pendekatan *Fixed Effect*. Nilai *R-squared* yang tercatat mencapai 0,8106 (81,06%) mengartikan bahwa mayoritas fluktuasi tingkat kemiskinan di setiap daerah kabupaten/kota secara lintas waktu sukses diuraikan dan direpresentasikan oleh interaksi ketiga variabel prediktor, yakni Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Adapun porsi minor sisanya sebesar 18,94% merupakan imbas atau kontribusi dari berbagai variabel eksternal di luar spesifikasi kerangka observasi penelitian ini.

Uji F

Merujuk pada hasil pengujian signifikansi simultan (Uji F), estimasi model mencatatkan nilai statistik F sebesar 51,56 dengan tingkat probabilitas 0,0001. Mengingat p-value tersebut berada jauh di bawah taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) secara meyakinkan tergugurkan dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Pembuktian empiris ini menegaskan bahwa durasi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), ketimpangan pendapatan (Rasio Gini), serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara serempak memberikan kontribusi dan pengaruh yang sangat signifikan dalam mendeterminasi dinamika persentase kemiskinan di wilayah observasi.

Uji T

Berdasarkan estimasi model akhir *Fixed Effect* yang telah dikalibrasi menggunakan pendekatan *Cluster-Robust Standard Error* (merujuk pada Tabel 15), evaluasi parsial melalui Uji t dilakukan untuk mengukur dampak masing-masing variabel secara spesifik. Pengujian hipotesis ini berpedoman pada batas toleransi kesalahan (α) sebesar 5%, dengan nilai kritis t-tabel yang ditetapkan pada angka 2,447 (pada derajat kebebasan atau $df = 6$). Tolok ukur statistik inilah yang dijadikan sebagai landasan utama untuk mengambil keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis dari ketiga variabel independen yang diuji.

ada evaluasi variabel distribusi pengeluaran atau Rasio Gini (X_2), komputasi statistik menghasilkan nilai t-hitung sebesar -2,09 dengan tingkat probabilitas (signifikansi) sebesar 0,081. Mengingat nilai mutlak t-hitung tersebut lebih rendah dari t-tabel ($2,09 < 2,447$) dan probabilitasnya berada di atas batas 0,05, maka hipotesis alternatif (H_a) ditolak dan H_0 diterima. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun koefisien regresi bernilai negatif (-5,587603) yang mengisyaratkan kecenderungan turunnya kemiskinan seiring naiknya indeks ketimpangan pengaruh tersebut nyatanya tidak valid secara statistik. Dengan kata lain, dinamika Rasio Gini tidak memberikan dampak yang nyata terhadap tingkat kemiskinan di wilayah pengamatan.

Berbeda halnya dengan indikator pendidikan, hasil uji pada variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS/X1) mencatatkan nilai mutlak t-hitung sebesar -9,03 yang sangat dominan melampaui t-tabel, disertai nilai signifikansi absolut sebesar 0,000 ($< 0,05$). Capaian ini memastikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima mutlak, membuktikan bahwa akses pendidikan memiliki pengaruh negatif dan sangat signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Besaran koefisien regresi di angka -4,029706 secara matematis mengartikan bahwa setiap penambahan rata-rata durasi sekolah selama satu tahun penuh akan konsisten menekan angka kemiskinan hingga 4,03 satuan, dengan asumsi faktor eksternal lainnya tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*).

Sementara itu, telaah pada variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT/X3) menghasilkan nilai t-hitung mutlak sebesar -2,65 (lebih besar dari 2,447) dengan tingkat signifikansi 0,038 ($< 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa H_0 kembali ditolak, sehingga pengangguran terbukti secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan. Namun, koefisien regresinya menunjukkan angka -0,125557, yang bermakna setiap lonjakan satu satuan tingkat pengangguran justru berkorelasi dengan penurunan kemiskinan sebesar 0,13 satuan. Arah korelasi yang negatif ini merepresentasikan sebuah anomali temuan, karena temuan tersebut bertolak belakang dengan landasan teori ekonomi konvensional yang meyakini bahwa naiknya jumlah pengangguran akan selalu diikuti oleh meroketnya penderitaan dan kemiskinan masyarakat.

Pembahasan

Pengaruh Rasio Gini terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian, terungkap bahwa fluktuasi ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Rasio Gini ternyata tidak memberikan pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Memang terdapat kecenderungan kecil di mana perubahan angka ketimpangan seolah-olah beriringan dengan penurunan kemiskinan, namun hubungan ini sangat lemah dan tidak bisa dibuktikan secara meyakinkan. Artinya, sempit atau lebarnya jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin bukanlah faktor penentu utama yang memengaruhi jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Kemiskinan di kawasan ini terbukti jauh lebih kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan indikator pemerataan uang semata.

Kondisi ini menjadi sangat masuk akal jika kita melihat langsung realitas dan kerasnya kehidupan di lapangan. Papua Barat memiliki tantangan geografis yang luar biasa berat, mulai dari pegunungan terjal, lembah yang dalam, pesisir yang terisolasi, hingga wilayah pelosok yang sangat sulit dijangkau oleh transportasi umum. Bagi masyarakat yang menetap di daerah-daerah terpencil ini, masalah utama mereka bukanlah membandingkan kekayaan dengan tetangga atau penduduk kota, melainkan ketiadaan akses terhadap kebutuhan paling dasar. Jalanan yang belum beraspal, sulitnya listrik, dan minimnya fasilitas air bersih membuat mereka secara absolut terkurung dalam garis kemiskinan, terlepas dari apakah ketimpangan di atas kertas terlihat membaik atau memburuk.

Di samping kendala alam, wajah perekonomian di Papua Barat juga kerap diwarnai oleh hadirnya proyek-proyek besar di sektor ekstraktif, seperti minyak, gas, dan pertambangan, yang sifatnya sangat eksklusif (ekonomi *enclave*). Perputaran uang dan kekayaan mungkin berputar sangat kencang di pusat-pusat industri tersebut, namun nyaris tidak memberikan efek tetesan ke bawah (*trickle-down effect*) bagi masyarakat adat dan penduduk lokal. Penduduk setempat yang mayoritas masih mengandalkan pertanian subsisten atau nelayan tradisional sering kali tidak terserap ke dalam lapangan kerja modern karena kalah dari segi keahlian dan akses pendidikan. Akibatnya, memperbaiki angka ketimpangan saja tidak akan berdampak banyak jika pemerintah tidak membangun fasilitas fisik, kesehatan, dan pendidikan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat bawah.

Realitas lapangan yang kompleks ini pada dasarnya sangat sejalan dengan *Teori Kemiskinan Struktural*. Teori ini berpandangan bahwa kemiskinan tidak terjadi semata-mata karena masyarakatnya malas atau karena distribusi pendapatan yang salah secara matematis, melainkan karena adanya struktur sosial, kebijakan, atau kondisi lingkungan seperti isolasi geografis dan ketimpangan infrastruktur yang merampas kesempatan mereka untuk maju. Selama masyarakat miskin tidak memiliki akses yang adil terhadap jalan raya, sekolah yang layak, dan pusat kesehatan, perbaikan Rasio Gini tidak akan mampu mengangkat mereka dari jurang kemiskinan. Mereka membutuhkan pembongkaran struktur yang menghambat tersebut agar bisa berpartisipasi dalam perputaran ekonomi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra et al., yang juga menemukan bahwa Rasio Gini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, karena besarnya ketimpangan di suatu daerah belum tentu merepresentasikan penderitaan absolut yang dialami oleh masyarakat kelas bawah. Namun di sisi lain, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Giovanni, yang dalam studinya membuktikan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan dalam memperparah kemiskinan. Pada wilayah dengan karakteristik yang berbeda, penelitian yang tidak sejalan tersebut berargumen bahwa jurang ekonomi yang terlalu lebar akan secara otomatis memutus akses kaum miskin terhadap modal dan fasilitas publik, sebuah kondisi yang ternyata tidak sepenuhnya berlaku mutlak di wilayah dengan kendala geografis ekstrem seperti Papua Barat.

Pengaruh Akses Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Secara sederhana, temuan ini menegaskan bahwa semakin lama masyarakat duduk di bangku sekolah dan mendapatkan akses pendidikan yang layak, maka semakin besar pula peluang mereka untuk terlepas dari jerat kemiskinan. Peningkatan durasi dan kualitas mengenyam pendidikan terbukti menjadi salah satu kunci utama yang berkontribusi langsung pada penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Namun, mewujudkan pendidikan yang merata di Papua Barat bukanlah perkara yang mudah jika dihadapkan pada kerasnya realitas di lapangan. Wilayah ini dihadapkan pada tantangan geografis yang sangat ekstrem, meliputi bentang alam berupa pegunungan yang curam, pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan luas, hingga kawasan pedalaman hutan yang terisolasi. Kondisi alam yang menantang ini berdampak langsung pada minimnya fasilitas bangunan sekolah yang memadai serta terbatasnya sarana prasarana penunjang belajar. Lebih dari itu, ketersediaan tenaga pengajar menjadi sangat timpang; sekolah-sekolah di pelosok sering kali mengalami kekurangan guru berkualitas karena sulit dan mahal akses transportasi menuju lokasi pengabdian.

Ketimpangan fasilitas dan sulitnya akses pendidikan ini pada akhirnya membawa pukulan telak bagi kelangsungan ekonomi masyarakat lokal. Ketika anak-anak di daerah terpencil tidak mendapatkan hak pendidikan yang optimal, mereka akan tumbuh menjadi angkatan kerja dengan bekal keterampilan yang minim. Akibatnya, mereka akan kalah bersaing di pasar kerja modern dan terpaksa bertahan di sektor-sektor informal dengan upah yang sangat rendah, sehingga siklus kemiskinan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, solusi pengentasan kemiskinan di daerah ini wajib berakar pada pemerataan infrastruktur sekolah, distribusi guru yang adil, serta perluasan beasiswa yang pelaksanaannya benar-benar disesuaikan dengan kondisi geografis setempat agar manfaatnya meresap hingga ke akar rumput.

Fakta di lapangan dan hasil penelitian ini nyatanya sangat berkesesuaian dengan konsep utama dalam *Human Capital Theory* (Teori Modal Manusia). Teori besar ini meyakini bahwa pendidikan tidak boleh dilihat sekadar sebagai rutinitas belajar-mengajar atau beban pengeluaran negara, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang yang paling berharga. Dengan menyekolahkan masyarakat, negara sedang menanam modal untuk mencetak individu-individu yang memiliki wawasan, keahlian, dan daya saing. Modal manusia yang unggul inilah yang nantinya akan mendorong produktivitas kerja, membuka lebih banyak keran peluang ekonomi, dan pada ujungnya mengangkat derajat serta pendapatan masyarakat agar keluar dari jurang kemelaratan.

Temuan ini sejalan dan memperkuat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fattah dan Rahman (2023) serta Afrianto (2025), yang juga menyimpulkan bahwa peningkatan akses pendidikan berbanding lurus dengan kesejahteraan dan secara signifikan mampu memangkas angka kemiskinan di Indonesia. Namun, hasil penelitian ini bisa jadi tidak sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu terutama studi di wilayah berkarakteristik urban yang terkadang menemukan bahwa tingginya angka pendidikan tidak selalu menurunkan kemiskinan secara instan. Ketidaksejajaran tersebut biasanya terjadi di daerah yang mengalami fenomena pengangguran terdidik, di mana banyak sarjana menganggur karena ijazah tinggi yang mereka miliki tidak terserap oleh sempitnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai. Meskipun demikian, khusus untuk konteks wilayah seperti Papua Barat, pemerataan pendidikan dasar hingga menengah terbukti masih menjadi senjata paling ampuh untuk melawan kemiskinan.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbukti memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap kemiskinan di Papua Barat, namun arah hubungannya justru terbalik atau negatif. Secara sederhana, ketika angka pengangguran secara statistik tercatat naik, persentase kemiskinan di wilayah tersebut justru cenderung mengalami penurunan. Temuan ini tentu saja menjadi sebuah anomali karena sangat bertolak belakang

dengan logika umum yang senantiasa mengasumsikan bahwa semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, maka jurang kemiskinan akan semakin melebar. Kejanggalan statistik ini menjadi sangat rasional dan bisa dipahami ketika kita membedah realitas asli di lapangan dan struktur sosial masyarakat Papua Barat. Di wilayah ini, mayoritas penduduk kelas bawah sebenarnya tidak menganggur dalam artian berdiam diri tanpa kegiatan. Demi menyambung hidup setiap harinya, mereka tetap bekerja memeras keringat dengan menggarap ladang pertanian tradisional, melaut sebagai nelayan subsisten, atau serabutan di sektor informal. Karena mereka melakukan aktivitas ekonomi harian, secara pendataan resmi mereka berstatus sebagai orang yang bekerja dan tidak masuk dalam daftar pengangguran. Sayangnya, pekerjaan tradisional yang mereka jalani tersebut hanya menghasilkan pendapatan yang sangat minim, sehingga mereka pada kenyataannya tetap terperangkap di bawah garis kemiskinan.

Di sisi lain, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) itu sendiri memiliki kelemahan karena secara spesifik hanya menghitung kelompok masyarakat yang benar-benar tidak bekerja dan sedang aktif melamar pekerjaan formal, yang biasanya didominasi oleh kaum terdidik atau masyarakat perkotaan. Oleh sebab itu, angka pengangguran yang terlihat rendah di Papua Barat nyatanya merupakan sebuah ilusi statistik; rendahnya pengangguran tidak menjamin tingginya kesejahteraan jika pekerjaan yang tersedia hanyalah pekerjaan bernilai tambah rendah. Selain itu, turunnya angka kemiskinan di tengah dinamika pengangguran ini juga sangat tertolong oleh intervensi eksternal, seperti derasnya aliran bantuan sosial tunai, program pemberdayaan desa, dan masifnya pembangunan infrastruktur fisik dari pemerintah yang langsung menopang daya beli masyarakat rentan.

Fenomena yang terjadi di Papua Barat ini secara terang-terangan mendobrak dan tidak sejalan dengan *Teori Ekonomi Makro Klasik*, khususnya yang berkaitan dengan teori ketenagakerjaan konvensional. Dalam kerangka teori besar tersebut, pengangguran selalu diposisikan sebagai variabel yang berbanding lurus dengan kemiskinan; jika pengangguran naik, maka pendapatan masyarakat hilang, dan kemiskinan dipastikan meroket. Namun, teori konvensional tersebut terbukti kurang relevan untuk membaca karakteristik perekonomian ganda (*dual economy*) di daerah berkembang. Di Papua Barat, batas antara bekerja dan menganggur menjadi sangat bias akibat besarnya dominasi sektor informal, di mana orang miskin tidak memiliki kemewahan untuk menganggur sehingga mereka terpaksa menerima pekerjaan apa saja meski upahnya jauh di bawah standar kelayakan.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji wilayah-wilayah dengan basis pertanian dan pedesaan yang kuat. Studi-studi tersebut sepakat bahwa pada masyarakat agraris, angka pengangguran seringkali tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya karena tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor informal yang tidak menjamin kelayakan hidup. Namun sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Hutabarat et al. (2025) serta Gozali dan Nurikmah (2025). Dalam penelitian mereka yang berfokus pada wilayah dengan sektor perindustrian dan pasar kerja formal yang lebih mapan, ditemukan kesimpulan klasik bahwa tingkat pengangguran terbuka terbukti memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan dalam memperparah badai kemiskinan di masyarakatnya.

Pengaruh Akses Pendidikan, Rasio Gini, dan TPT Secara Bersama-Sama terhadap Kemiskinan

Berdasarkan pengujian secara simultan, terbukti bahwa kualitas akses pendidikan, tingkat ketimpangan pendapatan, dan rasio ketersediaan lapangan kerja secara bersama-sama memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mengendalikan naik-turunnya angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Menariknya, meskipun sebelumnya ketimpangan pendapatan secara mandiri terlihat tidak memberikan dampak langsung, namun ketika faktor ini disatukan dan berinteraksi dengan isu pendidikan serta pengangguran, ketiganya menjelma menjadi sebuah kesatuan penggerak yang sangat krusial. Kombinasi dari ketiga elemen inti ini bahkan mampu memetakan dan menjawab secara gamblang mayoritas alasan mengapa kemiskinan berfluktuasi di wilayah tersebut. Hanya sebagian kecil saja dari persoalan kemiskinan ini yang dipicu oleh faktor-faktor luar yang tidak diteliti, seperti laju inflasi, investasi, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur. Hasil interaksi dari ketiga faktor ini sejatinya merupakan cerminan nyata dari kerasnya kehidupan sehari-hari masyarakat di Papua Barat, di mana kemiskinan tidak pernah hadir sebagai masalah tunggal. Di lapangan, sebuah keluarga rentan biasanya terperangkap dalam lingkaran setan yang saling mengunci: karena mereka menetap di pelosok atau kepulauan terpencil, anak-anak mereka kesulitan mengakses sekolah yang layak (pendidikan). Rendahnya bekal ilmu ini kemudian memaksa mereka hanya bisa bekerja serabutan di sektor informal (ketenagakerjaan), sementara di saat yang sama kekayaan alam di sekitar mereka dieksploitasi oleh industri berskala besar yang keuntungannya tidak menetes ke masyarakat bawah (ketimpangan). Ketiga masalah ini saling tumpang tindih bak benang kusut yang mengikat masyarakat dalam jerat prasejahtera.

Kondisi struktural yang saling terkait erat ini memberikan sinyal peringatan yang tegas bagi para pemangku kebijakan di daerah. Mengingat kemiskinan di Papua Barat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang berjalanan, maka pemerintah tidak bisa lagi menanggulanginya dengan cara "tambal sulam" atau sekadar menyalurkan bantuan sosial sesaat. Membangun gedung sekolah tanpa menciptakan lapangan kerja yang adil hanya akan melahirkan pengangguran terdidik. Sebaliknya, membuka keran investasi raksasa tanpa mendidik warga lokal justru akan memperlebar ketimpangan dan menjadikan penduduk asli sekadar penonton di tanah mereka sendiri. Oleh sebab itu, pengentasan kemiskinan wajib dirancang secara keroyokan dan terintegrasi, di mana pendidikan, pembukaan kerja produktif, dan pemerataan ekonomi dikerjakan secara serempak.

Melihat tingginya kompleksitas masalah ini, temuan penelitian tersebut sangat selaras dan semakin memperkuat *Teori Kemiskinan Multidimensi* (Multidimensional Poverty Theory) yang digagas oleh pakar ekonomi Alkire dan Foster. Teori besar ini menggarisbawahi bahwa kemelaratan bukanlah sekadar ketiadaan uang tunai di dompet, melainkan sebuah bentuk perampasan hak asasi (*deprivation*) yang menimpa berbagai dimensi kehidupan secara bersamaan. Seseorang dikategorikan miskin karena mereka secara simultan kehilangan akses terhadap pendidikan yang mumpuni, standar hidup yang merata, dan pekerjaan yang layak. Fakta bahwa ketiga variabel makro tersebut secara kolektif menjadi dalang utama kemiskinan di Papua Barat adalah bukti empiris bahwa teori ini benar adanya; kemiskinan adalah penyakit komplikasi yang butuh penyembuhan menyeluruh.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikerjakan oleh Ulfatussaniah et al. (2024), yang menegaskan bahwa indikator pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi bekerja secara simultan sebagai mesin utama penggerak kesejahteraan makro, sehingga penyelesaiannya tidak bisa dipisah-pisah. Namun di sisi lain, hasil temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andani et al. (2025) terkait masyarakat marjinal. Penelitian berfokus mikro tersebut umumnya berargumen bahwa kemiskinan mutlak didominasi oleh kebiasaan atau faktor kultural di level rumah tangga seperti jumlah beban tanggungan keluarga atau rendahnya etos kerja individu sehingga mereka kerap skeptis bahwa perbaikan indikator makro seperti rasio Gini dan pengangguran agregat bisa serta-merta mencabut akar kemiskinan di tingkat masyarakat paling bawah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kualitas pendidikan, ketimpangan pendapatan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara serempak menjadi determinan utama yang menjelaskan 81,06% fluktuasi angka kemiskinan. Secara parsial, durasi pendidikan terbukti secara kuat dan signifikan mampu menekan tingkat kemiskinan. Fenomena menarik justru ditemukan pada indikator TPT yang memberikan efek negatif dan signifikan; sebuah anomali dari teori klasik yang merepresentasikan realitas bahwa penduduk prasejahtera di Papua Barat umumnya tidak menganggur, melainkan terserap sebagai pekerja berupah minim di sektor informal. Sementara itu, perubahan ketimpangan distribusi pendapatan belum mampu memberikan dampak yang signifikan secara statistik terhadap naik-turunnya angka kemiskinan di wilayah tersebut. Temuan ini memberikan implikasi strategis bagi pemerintah daerah bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup diselesaikan melalui penciptaan lapangan kerja semata, melainkan menuntut adanya proteksi upah di sektor informal serta investasi masif pada pemerataan fasilitas pendidikan formal. Riset ini sendiri memiliki batasan empiris, yakni rentang waktu observasi yang relatif singkat (lima tahun) serta keterbatasan model yang menyisakan 18,94% faktor determinan kemiskinan lain yang belum teridentifikasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas dimensi waktu pengamatan serta mengakomodasi variabel makroekonomi dan spasial lainnya—seperti laju pertumbuhan ekonomi (PDRB), indeks pembangunan infrastruktur, hingga efektivitas alokasi dana otonomi khusus—guna menghasilkan potret mitigasi kemiskinan yang lebih holistik dan berpresisi tinggi di kawasan timur Indonesia.

Reference

1. Afrianto, Y. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2023. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 4(1), 82–88.
2. Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 476–487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
3. Andani, D., Fitriani, D. R., Subang, U., Padjajaran, U., Publik, K., & Publik, A. (2025). Fenomena Kemiskinan Dan Respons Kebijakan Publik Di Wilayah Subang Utara. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(2).
4. Aprilia, O. (2024). Kemiskinan: Pengertian Menurut Para Ahli. <https://Www.Rsubidadari.Co.Id/Pengertian-Kemiskinan-Menurut-Para-Ahli/>
5. Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. PublicAffairs.
6. BPS. (2024). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. <https://Www.Bps.Go.Id/Id/Pressrelease/2023/07/17/2016/Profil-Kemiskinan-Di-Indonesia-Maret-2023.Html>.
7. BPS Provinsi Papua Barat. (2025a). *Kedaaan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat Februari 2025* (Issue 71).

8. BPS Provinsi Papua Barat. (2025b). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Papua Barat Maret 2025. <https://Papubarat.Bps.Go.Id/Id/Pressrelease/2025/07/25/1141/Persentase-Penduduk-Miskin-Papua-Barat-Pada-Maret-2025-Sebesar-20-66-Persen--Menurun-0-43-Persen-Poin-Terhadap-September-2024-.Html>.
9. Fattah, S., & Rahman, A. (2023). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 145–158.
10. Fitriani, Rusla, Budiman, H., Wibawa, G. A., Somayasa, & Wayan. (2024). Pemodelan Angka Kemiskinan Menggunakan Regresi Data Panel Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Matematika, Komputasi Dan Statistika*, 4(2), 652–662.
11. Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: UNDIP. <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5780>
12. Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 4(1), 35–46.
13. Giovannini, R. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23–31.
14. Gozali, N., & Nurikmah, J. (2025). The Impact of the Open Unemployment Rate on the Poverty Rate in Indonesia from 2014 to 2023. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 8(1), 1–17.
15. Gujarati, D. N. (2010). *Essentials of Econometrics* (4th ed). McGraw-Hill Education.
16. Hisyam, C. J., Making, E. K., Pratama, R. A. A., Priambodo, R., Baihaqqi, R. F., & Ravelia, V. (2025). Kemiskinan Terhadap Masyarakat Marginal : Studi Kasus di Pemukiman Pemulung Wilayah Bintara Jaya , Bekasi Barat. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(2), 307–321.
17. Hutabarat, F. B., Lubis, E. H., & Suhariantio, J. (2025). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatra Utara (2001-2023) The Influence of Open Unemployment Rate (TPT), Human Development Index (HDI), and Inflation on P. JIIC: *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 5667–5677.
18. Jordan, K., & Mardjono, E. S. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dilihat dari Proporsi Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat 2018-2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 4(2), 230–239.
19. Kesumawati, Nila, dkk. (2017). *Pengantar Statistika Penelitian*. Raja Grafindo Persada.
20. Maharani, A., Raihan, A. F., Hidayatullah, M. R., & Putra, A. R. (2025). Analisis Kesejahteraan dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Terhadap Tingkat Pengangguran di Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Mirai Management*, 10(1), 514–526.
21. Miftahussalam, M., & Rofiuddin, M. (2021). Pengaruh PDRB indeks pemangungan manusia dan zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(1), 40–54.
22. Novirsari, E. (2025). Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah 3T dan Dampaknya terhadap Mobilitas Sosial Generasi Muda. *Applied Multidisciplinary Science (AMS)*, 1(1).
23. Nur, R., Lingga, S., Matematika, P. S., Matematika, F., & Padang, U. N. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 18054–18064.
24. Putra, H. P., Diaudin, M., Fahrudin, R., & Suwanan, A. F. (2021). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk , Gini Ratio Dan Pertumbuhan Pdrb Perkapita Terhadap Angka Kemiskinan Di Kota Blitar Tahun 2011-2020. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 18(2), 152–161.
25. Putri A., R. M., & Azise, R. (2024). Kemiskinan, Pengangguran, UMP, dan Ekonomi terhadap IPM di Riau. *Jurnal Ekonomi Riau*, 5(1), 88–101.
26. Ramadhan, R. (2024). Pengaruh Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2022. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 3(01), 108–118.
27. Sarpin, Ridwan, H., Roslan, S., & Tanzil. (2025). Kerentanan sosial dan kemiskinan multidimensi rumah tangga miskin. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 6(November), 205–218.
28. Sholeh, M. (2022). Pengaruh Pendidikan, Jumlah Anggota Keluarga, Dan Akses Informasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 19(1).
29. Suryadarma, D., Poesoro, A., & Budiyati, S. (2021). The Dynamics of Poverty in Papua: A Panel Data Analysis. *SMERU Research Institute*.
30. Ubaidillah, M. R. S. Al, & Yasin, M. (2024). Analisis Pengangguran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perekonomian Indonesia Jenis-Jenis Pengangguran. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 34–42.
31. Ulfatussaniah, A., Murwiati, A., & Wahyudi, H. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan , Pendidikan , Infrastruktur dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten / Kota di Tiga Provinsi Termiskin di Pulau Sumatera. *Journal on Education*, 06(03), 16720–16729.
32. Widiastuti, T. (2010). Kemiskinan Informasi. *Lmu Komunikasi*, 8(3), 314–329.
33. Winarno, W. W. (2011). *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan EViews*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
34. World Bank. (2023). Ending Poverty: The Road to 2030. <https://www.worldbank.org/en/events/2017/03/21/ending-poverty-the-road-to-2030?>